



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN- PT NO. : 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Kebijakan Indonesia Mendukung Pelaksanaan *Green Economy* : Kehutanan dan Transportasi (2014 – 2022)

Skripsi

Oleh

Rafqyandithka Assyrafi

6091801191

Bandung

2023



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN- PT NO. : 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Kebijakan Indonesia Mendukung Pelaksanaan *Green Economy* : Kehutanan dan Transportasi (2014 – 2022)

Skripsi

Oleh

Rafqyandithka Assyrafi

6091801191

Pembimbing

Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A.

Bandung

2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Rafqyandithka Assyrafi
Nomor Pokok : 6091801191
Judul : Kebijakan Indonesia Mendukung Pelaksanaan *Green Economy* :
Kehutanan dan Transportasi (2014 – 2022)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 11 Juli 2023
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

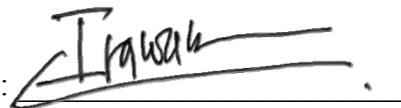
Ketua sidang merangkap anggota

Dr. phil. Aknolt Kristian Pakpahan, MA

: 

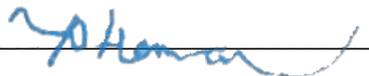
Sekretaris

Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A.

: 

Anggota

Yulius Purwadi Hermawan, Drs, M.A., Ph.D.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

DAFTAR PERBAIKAN NASKAH SKRIPSI

Nama : Rafqyandithka Assyrafi
Nomor Pokok Mahasiswa : 6091801191
Program Studi : Hubungan Internasional
Pembimbing : Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A. (19900182) Pembimbing Tunggal
Hari dan tanggal ujian skripsi : Selasa tanggal 11 Juli 2023
Judul (Bahasa Indonesia) : Upaya Indonesia Mendukung Pelaksanaan *Green Economy* : Pariwisata, Kehutanan, dan Transportasi (2014 – 2022)
Judul (Bahasa Inggris) : *Indonesia's Efforts to Support the Implementation of Green Economy: Tourism, Forestry, and Transportation (2014 – 2022)*

1. Perbaikan Judul Skripsi menjadi (**Judul harus ditulis lengkap menggunakan huruf besar kecil/Title Case**)

Judul (Bahasa Indonesia) Kebijakan Indonesia Mendukung Pelaksanaan *Green Economy* : Kehutanan dan Transportasi (2014 – 2022)

Judul (Bahasa Inggris) *Indonesia's Policy to Support the Implementation of Green Economy: Forestry and Transportation (2014 – 2022)*

2. Perbaikan Umum (meliputi : cara merujuk, daftar pustaka, teknis editing) :

- Perbaikan kata "seorang" Joko Widodo menjadi Joko Widodo saja hal. 36
- Perbaikan kata bahasa Inggris ditulis italic (miring) disetiap penulisan judul, subbab, dan teks isi.
- Semua gambar menggunakan keterangan dan kualitasnya jelas
- Perbaikan struktur nomor daftar isi. Misal (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) pada bab 2
- Penulisan UUD No. 16/2016 menjadi UU No. 16/2016 hal. 39
- Penulisan typo diperbaiki dan sudah dicek ulang. Hal. 35, 39, 59, 75, 77.
- Pembahasan menjadi dua sektor yakni kehutanan dan transportasi.

3. Perbaikan di Bab 1 - Penggunaan kata rezim dihilangkan pada abstrak dan menyelaraskannya dengan pemerintahan
- Struktur bab 1 dari mulai latar belakang hingga sistemastika pembahasan direvisi dengan menyesuaikan judul serta pertanyaan penelitian
- pertanyaan penelitian diubah dengan kata kebijakan dan menghilangkan sektor pariwisata

4. Perbaikan di Bab 2 - Bab 2 mengubah pembahasan "nawacita", namun diganti dengan RPJMN Indonesia tahun 2014-2019 terkait sektor hutan dan transportasi sebagai keterkaitan pembahasan di bab 3
- Pendalaman komitmen global Indonesia dalam mendukung *green economy*

5. Perbaikan di Bab 3 - Bab 3 menambahkan kebijakan nasional Indonesia terkait adopsi *Paris Agreement* melalui UU no. 16 tahun 2016 dan Rencana Umum Energi Nasional melalui Perpres no. 22 tahun 2017
- Kondisi sebelum dan sesudah kebijakan menjadi selaras (misal. Konflik agraria diatasi dengan kebijakan TORA ; Deforestasi dengan pengelolaan hutan produksi dan restorasi lahan gambut.)

6. Perbaikan di Bab 4 Kesimpulan diperbaiki dengan menjawab :

- Kebijakan Indonesia terkait pelaksanaan *green economy* mengarah kepada perencanaan penggunaan energi alternatif dan penekanan gas rumah kaca pada pembangunan nasional.
- Dalam sektor hutan Indonesia membentuk kebijakan pemeliharaan kawasan hutan dengan reforma agraria dan pengelolaan kawasan hutan berkelanjutan sehingga menekan turun angka deforestasi
- Dalam sektor transportasi Indonesia mulai membentuk kebijakan pasar transportasi listrik sebagai kendaraan masyarakat dengan memanfaatkan komponen dalam negeri serta keramahan pengeluaran gas emisinya.
- Kedua sektor hutan dan transportasi masih belum bisa menekan produksi gas emisi nasional secara signifikan, namun sektor hutan dapat menurunkan angka deforestasi yang awalnya berada dikisaran 1juta hektar menurun pada 2 ratus ribu hektar. (Meskipun tahun 2019 terjadi kenaikan kembali namun dapat turun lagi pada periode tahun 2021-2022)

7. Perbaikan di Bab 5 #N/A

DOKUMEN INI TIDAK PERLU DITANDATANGANI LAGI

Bandung, 11 Juli 2023

Ketua Program Studi,

kaprodi_hi.fisip@unpar.ac.id
7/12/2023 10:07:31

Marshell Adi Putra, S.IP., MA.

Penguji,

pakpahan@unpar.ac.id

7/11/2023 13:58:20

Dr. phil. Aknolt Kristian Pakpahan, MA

Penguji (Pembimbing),

irawanaj@unpar.ac.id
7/12/2023 9:54:33

Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.
A.

Penguji,

purwadi@unpar.ac.id

7/16/2023 18:18:52

Yulius Purwadi Hermawan, Drs, M.A., Ph

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rafqyandithka Assyrafi

NPM : 6091801191

Jurusan/Program Studi : Hubungan Internasional

Judul : Kebijakan Indonesia Mendukung Pelaksanaan
Green Economy : Kehutanan dan Transportasi (2014
– 2022)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 21 Juni 2023



Rafqyandithka Assyrafi

ABSTRAK

Nama : Rafqyandithka Assyrafi

NPM : 6091801191

Judul : Kebijakan Indonesia Mendukung Pelaksanaan *Green Economy* :
Kehutanan dan Transportasi (2014 – 2022)

Kajian penelitian ini memiliki fokus pembahasan topik Green Economy sebagai salah satu agenda Indonesia di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Topik green economy ini sudah berkembang sejak tahun 1990 dipopulerkan oleh ekonom Inggris bernama David William Pearce. Konsep green economy sendiri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dengan berlandaskan lingkungan dan keadilan sosial. Memasuki tahun 2000 hingga 2011 green economy mulai memiliki perkembangan konsep yang luas dan di adopsi secara internasional melalui UNEP dan lembaga internasional lainnya. Indonesia dibawah komando Presiden Joko Widodo memiliki visi pembangunan ekonomi berbasis kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Untuk memenuhi visi tersebut, pembangunan berkelanjutan yang meninjau keberlangsungan lingkungan hidup perlu diperhatikan. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk meneliti kebijakan pengembangan green economy di Indonesia pada era kepresidenan Jokowi dari tahun 2014 hingga 2022. Terdapat dua sektor pengembangan nasional yang akan ditinjau melalui kebijakannya, yaitu kehutanan dan transportasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan model studi kasus. Sumber yang mendukung penelitian ini diperoleh dari data sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kebijakan yang dilakukan pemerintahan Jokowi dalam mengembangkan implementasi green economy di Indonesia. Hasil temuan dari penelitian ini mengungkapkan jika Indonesia menerapkan beberapa kebijakan melalui pembentukan regulasi dan program pemerintah di dua sektor tersebut. Dalam sektor kehutanan Indonesia melakukan pengawasan terhadap keberlanjutan hutan melalui tata kelola hutan yang baik. Selanjutnya dalam sektor transportasi Indonesia berupaya melakukan program untuk bertransisi dari penggunaan kendaraan motor berbahan bakar fosil menuju kendaraan bermotor listrik.

Kata Kunci : *Green economy*; Indonesia; Jokowi; Kebijakan;
Kehutanan; Transportasi

ABSTRACT

Nama : Rafqyandithka Assyrafi

NPM : 6091801191

Judul : *Indonesia's Policy to Support the Implementation of Green Economy: Forestry and Transportation (2014 – 2022)*

This research study focuses on discussing the topic of Green Economy as one of Indonesia's agendas in the era of President Joko Widodo's leadership. The topic of green economy has developed since 1990 and was popularized by British economist David William Pearce. The concept of green economy itself is an economic activity that considers sustainable development based on the environment and social justice. Entering 2000 to 2011 the green economy began to have a broad concept development and was adopted internationally through UNEP and other international institutions. Under President Joko Widodo's command, Indonesia has a vision of economic development based on welfare and justice for the people. To fulfill this vision, it is necessary to pay attention to sustainable development that reviews environmental sustainability. In this research, the authors are interested in examining green economy development policy in Indonesia during Jokowi's presidency from 2014 to 2022. There are two national development sectors that will be reviewed through their policies, which are forestry and transportation. This study uses a qualitative method with a case study model approach. Sources that support this research are obtained from secondary data in the form of books, journals, and online articles. The purpose of this research is to understand how the policies carried out by the Jokowi government in developing the implementation of green economy in Indonesia. The findings from this study reveal that Indonesia implements several policies through the establishment of regulations and government programs in these two sectors. In the forestry sector, Indonesia supervises forest sustainability through good forest governance. Furthermore, in the transportation sector, Indonesia is trying to carry out a program to transition from the use of fossil-fueled vehicles to electric vehicles.

Keywords : *Green economy; Indonesia; Jokowi; Policy; Forestry; Transportation*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kasih karunia-Nya, penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **“Kebijakan Indonesia Mendukung Pelaksanaan *Green Economy* : Kehutanan dan Transportasi (2014 – 2022)”**. Penelitian ini disusun sebagai salah satu prasyarat kelulusan jenjang Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Besar harapan penulis bahwa kiranya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dan turut membantu perkembangan Studi Hubungan Internasional, khususnya dalam bidang ekonomi politik internasional. Namun, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini memiliki banyak keterbatasan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis akan menerima setiap masukan, kritik, dan saran yang dapat membantu penyempurnaan skripsi ini serta membangun kemajuan penulis di masa yang akan datang.

Bandung, 21 Juni 2023



Rafqyandithka Assyrafi

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang turut berkontribusi dan memberikan bantuan kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, sampai akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

1. Terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kemudahannya, yang membantu penulis untuk dapat melewati segala tantangan yang ada selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Terimakasih kepada keluarga saya, khususnya kedua orang tua saya. Berikutnya kepada kakak kandung saya yang bernama Chika dan Argy atas segala dukungan moral maupun material yang selalu diberikan dibalik segala kesibukan yang sedang dilakukan.
3. Terima kasih kepada Mas Irawan (Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A.) selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan masukan bagi penulis. Terimakasih banyak atas seluruh waktu dan bimbingannya selama ini. Semoga selalu sukses dan selalu menjadi teladan baik bagi mahasiswa maupun rekan-rekan dosen lainnya.
4. Untuk seluruh dosen HI Unpar, terima kasih untuk segala ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang telah kalian semua amalkan sehingga penulis memiliki bekal ilmu yang cukup untuk menyusun tugas akhir ini.

5. Terakhir, terima kasih banyak untuk semua teman penulis yang menjadikan masa kuliah penulis menjadi lebih menyenangkan. Terima kasih untuk segala kenangannya, semoga kita dapat bertemu di kesempatan selanjutnya setelah lulus kuliah.

Demikian ucapan terimakasih dari penulis, semoga Tuhan membalas semua jasa dan kebaikan yang telah kalian berikan. Sukses dan sehat selalu!

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I : Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Perumusan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
1.6 Manfaat Penelitian	6
1.7 Kajian Literatur.....	7
1.8 Kerangka Pemikiran.....	12
1.9 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	20
1.10 Sistematika Pembahasan	21
BAB II : <i>Green Economy</i> dan Visi Indonesia.....	23
2.1 Perkembangan <i>Green Economy</i> sebagai Isu Internasional.....	23
2.2 Target-target Pendukung Penerapan <i>Green Economy</i>	31
2.3 Visi Indonesia Dalam Pengembangan <i>Green Economy</i>	34
2.4 Komitmen Indonesia Dalam Forum Internasional.....	38

BAB III : Kebijakan Nasional Serta Kondisi Sebelum dan Sesudah Kebijakan Pemerintah Mendukung Pelaksanaan <i>Green Economy</i> di Indonesia : Sektor Kehutanan dan Transportasi (2014 – 2022)	43
Kebijakan Undang-Undang No. 16 Tahun 2016	45
Kebijakan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017	47
3.1 Kehutanan	48
3.1.1 Kondisi Sebelum Kebijakan Kehutanan	48
3.1.1.1 Deforestasi Tinggi	48
3.1.1.2 Konflik Agraria	51
3.1.2 Kondisi Setelah Memberlakukan Kebijakan Kehutanan	53
3.1.2.1 Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	53
3.1.2.2 Perbaikan Tata Kelola Hutan	55
3.1.2.3 Program Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SIPHPL)	56
3.1.2.4 Program Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK)	57
Faktor Upaya Regulasi dan Tata kelola	59
3.2 Transportasi	62
3.2.1 Kondisi Sebelum Kebijakan Transportasi Listrik	62
3.2.1.1 Tingginya Volume Kendaraan Energi Fosil	62
3.2.1.2 Ketergantungan Industri Transportasi Terhadap Komponen Impor .	65
3.2.2 Kondisi Setelah Kebijakan Transportasi Listrik	67
3.2.2.1 Percepatan Penggunaan Transportasi Listrik	67
3.2.2.2 Peningkatan Kualitas Industri Transportasi Dalam Negeri	69
3.2.2.3 Kerjasama Pemerintah dengan Sektor Usaha	71
Faktor Transisi Ekonomi, Regulasi, dan Kolaborasi Pemerintah - Pelaku Usaha.....	73
BAB IV : Kesimpulan	76
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4.1 Partisipasi Indonesia Dalam Kesepakatan Internasional.....	39
Gambar 3.2.1 Data grafis perbandingan sebelum dan sesudah kebijakan TORA & Perhutanan sosial.....	54
Gambar 3.2.2 Data grafis penurunan deforestasi dan titik panas di Indonesia 2015-2018.....	58
Gambar 3.3.1 Jumlah total penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia tahun 2007-2017.....	64
Gambar 3.3.2 Peningkatan penjualan kendaraan listrik tipe BEV, HEV, PHEV 2019-2022.....	70

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pengembangan *green economy* merupakan istilah yang mulai populer dan menjadi salah satu isu penting dalam hubungan internasional. Kemunculan isu ini didorong dari adanya inisiasi oleh organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berbasis lingkungan pada tahun 1992. Organisasi PBB beserta badannya yang bergerak khusus di bidang lingkungan secara khusus yaitu *United Nations Environment Programme* (UNEP) memperkenalkan istilah *green economy* sebagai ajakan bagi para pembuat kebijakan dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang berbasis lingkungan. Secara definisi *green economy* memiliki arti yang cukup luas. Namun dalam pengertian garis besarnya, *green economy* merupakan sebuah kondisi terciptanya alur ekonomi atau sistem perdagangan yang memperhatikan aspek kelestarian serta keramahan lingkungan bagi para aktor yang terlibat dalam sistem perekonomian tersebut.¹ Sistem ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan ini memusatkan fokus tujuannya untuk aktivitas ekonomi yang sehat dan berkontribusi bagi keramahan lingkungan. Seperti misalnya fokus dalam perdagangan barang dan pembangunan yang tidak memperbanyak emisi gas karbon, penggunaan sumber daya alternatif, inovasi teknologi ramah lingkungan

¹ Eleonore Loiseau et al., "Green Economy and Related Concepts: An Overview," *Journal of Cleaner Production* 139 (2016): hal. 363, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.024>.

dan sebagainya.² Akan tetapi dalam mewujudkan pembangunan *green economy* ini tentunya juga tidak akan mudah bagi setiap negara. Terdapat beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi oleh beberapa negara di dunia termasuk Indonesia.

Pada tahun 2014 menjadi tahun pertama Joko Widodo menduduki jabatan sebagai seorang Presiden Indonesia. Pada periode pertama kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo memiliki salah satu prioritas untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam upaya mewujudkan prioritas tersebut, Jokowi menginginkan peningkatan pembangunan infrastruktur negara dan mengencakan investasi bagi Indonesia. Menurutnya, kondisi ketidakmerataannya perekonomian di Indonesia disebabkan oleh kurangnya infrastruktur sehingga mempersulit arus ekonomi di berbagai daerah.³ Berdasarkan data anggaran belanja infrastruktur, pada tahun 2015 Jokowi mengeluarkan dana belanja negara sebesar Rp 256 triliun. Berlanjut ke tahun - tahun berikutnya juga terjadi peningkatan belanja yang signifikan ketimbang pengeluaran sebelumnya.⁴ Pengeluaran belanja negara yang besar menjadi salah satu bukti yang kuat jika pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat berambisi melakukan pembangunan ekonomi nasional.

Meskipun demikian, pembangunan ekonomi nasional di tahun pertamanya disambut dengan masalah kebakaran hutan yang besar. Pada tahun 2015 Indonesia telah mengalami kebakaran lahan hutan gambut lebih dari 800.000 hektar. Sekaligus membuat kerugian negara belasan miliar rupiah. Kebakaran hutan ini pun

² *Ibid. hal. 365.*

³ Joshua Kurlantzick, "Jokowi's Priorities" diakses pada 13 Oktober 2022, <https://thediplomat.com/2014/09/jokowis-priorities/>.

⁴ CNBC Indonesia Research, "Tinjauan Tematik Kinerja Ekonomi Jokowi - Jk," diakses pada 13 Oktober 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/evaluasi-ekonomi-era-jokowi.pdf>.

menghasilkan banyak gas emisi atau rumah kaca yang asapnya menyebar ke negara tetangga kawasan Asia Tenggara.⁵ Menindaklanjuti permasalahan kebakaran hutan, Presiden Joko Widodo mulai berperan aktif dalam memperkuat regulasi perlindungan lingkungan. Pada tahun 2016 hingga 2020 Jokowi berusaha membenahi masalah lingkungan dengan memanfaatkan juga kolaborasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beserta lembaga kementerian lainnya untuk mendorong pembangunan.⁶ Presiden Joko Widodo juga mulai membahas target pemerintahannya untuk semakin mendorong perkembangan *green economy* di Indonesia. Menurutnya pembangunan ekonomi Indonesia di tahun berikutnya sudah harus berorientasi terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.⁷ Dalam hal ini penulis tertarik untuk menggali lebih dalam pada penelitian ini terkait upaya pemerintahan Presiden Jokowi dalam membangun pengembangan *green economy* di Indonesia hingga tahun 2022.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam skala global maupun nasional tantangan untuk mewujudkan visi *green economy* cukup besar. Terutama terkait dengan keadaan negara Indonesia

⁵ Rini Astuti, Helena Varkkey, and Zu Dienle Tan, "Tiga Hal Yang Bisa Dilakukan Jokowi Untuk Tangani Kebakaran Hutan Di Indonesia," *The Conversation*, diakses pada 13 Oktober 2022, <https://theconversation.com/tiga-hal-yang-bisa-dilakukan-jokowi-untuk-tangani-kebakaran-hutan-di-indonesia-121271>.

⁶ Ilyas Listianto Mujib, "Menilik Prestasi Jokowi Tuntaskan Kasus Kebakaran Hutan Dan Izin Lahan," *IDN Times*, diakses pada 13 Oktober 2022, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/ilyas-listianto-mujib-1/menilik-prestasi-jokowi-tuntaskan-kasus-kebakaran-hutan-dan-izin-lahan?page=all>.

⁷ Diamanty Meiliana, "Jokowi Perintahkan Penguatan Green Dan Blue Economy" *Kompas.com*, diakses pada 13 Oktober 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/04/12562441/jokowi-perintahkan-penguatan-green-dan-blue-economy>.

yang masih berkembang. Tidak mudah bagi negara yang belum maju untuk dapat mengimplementasikan setiap kegiatan ekonominya berbasis pada lingkungan. Hal tersebut tentunya menyangkut banyak hal seperti belum adanya perkembangan teknologi yang memadai, keadaan politik yang masih belum stabil, dan sumber dayanya yang masih kurang, baik dari segi manusia maupun infrastruktur di Indonesia.⁸

Tantangan pembangunan ekonomi lingkungan di Indonesia adalah tingginya pengeluaran gas emisi karbon di Indonesia. Berdasarkan data dari *World Resource Institute* (WRI), Indonesia telah mengeluarkan 2 miliar ton gas emisi karbon pada tahun 2014. Menjadikan negara Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang menyumbang gas emisi terbesar di dunia.⁹ Tingginya angka tersebut disebabkan oleh asap kendaraan bermotor dan kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2014 - 2015 yang sebagian besar terjadi di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua. Data yang diunggah oleh *Global Forest Watch Fires* menunjukkan jika sebesar 52% kebakaran di Indonesia terjadi di wilayah lahan gambut.¹⁰

Proses pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi ramah lingkungan juga memakan biaya yang lebih mahal dibanding harga barang pada

⁸ Ramadhan Harisman, "Pertumbuhan Hijau Di G20 Dan Strategi Indonesia - Badan Kebijakan Fiskal," diakses pada 15 Oktober 2022, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Pertumbuhan%20hijau%20di%20G20%20dan%20strategi%20Indonesia.pdf>.

⁹ Yunanto Wiji Utomo, "Indonesia Penghasil Emisi Karbon Tertinggi Keenam Di Dunia," KOMPAS.com diakses pada 15 Oktober 2022, <https://sains.kompas.com/read/2014/10/15/19551581/Indonesia.Penghasil.Emisi.Karbon.Tertinggi.Keenam.di.Dunia>.

¹⁰ Nancy Harris (WRI) et al., "Kebakaran Hutan Di Indonesia Menghasilkan Emisi Harian Yang Lebih Besar Daripada Emisi Perekonomian as Secara Keseluruhan," WRI Indonesia, diakses pada 15 Oktober 2022, <https://wri-indonesia.org/id/blog/kebakaran-hutan-di-indonesia-menghasilkan-emisi-harian-yang-lebih-besar-daripada-emisi>.

umumnya. Hal ini dikarenakan bahan material yang digunakan terbatas ketersediaannya dan juga biaya perawatannya yang lebih mahal serta cenderung kompleks.¹¹ Tak berhenti disitu, Indonesia juga masih memiliki kendala dalam mengelola sumber daya energi terbarukan. Kurangnya riset serta dana investasi untuk pengembangan energi terbarukan membuat Indonesia tidak memiliki kapasitas besar untuk mengelola sumber daya terbarukan. Sebagian besar permintaan masyarakat masih sangat bergantung kepada bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi. Bahkan kebijakan fiskal yang memberikan subsidi kepada masyarakat pun telah menghabiskan dana sebesar Rp 77 triliun dari pendapatan negara tahun 2017.¹²

Berdasarkan pemaparan masalah tersebut, visi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ekonomi sentris pada kenyataannya masih meninggalkan dampak lingkungan yang buruk. Indonesia sebagai sebuah negara tentunya perlu melakukan upaya tertentu demi mengatasi tantangan dan hambatan *green economy* yang terjadi pada periode tertentu. Maka dari itu pemerintah Indonesia perlu melakukan berbagai upaya melalui kebijakan ekonominya menuju ke pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Penulis sendiri telah mengidentifikasi bahwa terdapat dua sektor yang menjadi potensi Indonesia untuk mengembangkan *green*

¹¹ Edward Barbier, "The Policy Challenges for Green Economy and Sustainable Economic Development," *Natural Resources Forum* 35, no. 3 (2011): hal. 238, <https://doi.org/10.1111/j.1477-8947.2011.01397.x>.

¹² Laksono Hari Wiwoho and Ratna Tondang, "Peningkatan Energi Terbarukan, Tantangan Besar Bagi Indonesia," KOMPAS.com, diakses pada 15 Oktober 2022, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/28/160220126/peningkatan-energi-terbarukan-tantangan-besar-bagi-indonesia?page=all>.

economy, yaitu kehutanan dan transportasi. Sehingga peninjauan penelitian akan difokuskan melalui kedua sektor tersebut.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan dari pembahasan penelitian ini dibatasi dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi tantangan *green economy* di era Presiden Joko Widodo pada sektor kehutanan dan transportasi. Pembahasan mengenai kondisi sebelum dan setelah kebijakan akan berfokus kepada kebijakan pemerintah yang dilaksanakan sepanjang periode tahun 2014 hingga tahun 2022.

1.4 Perumusan Masalah

Penelitian ini akan didasari oleh pertanyaan penelitian “Bagaimana kebijakan Indonesia mendukung pelaksanaan *green economy* di sektor kehutanan dan transportasi tahun 2014 – 2022 ?”

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam mendukung pengembangan *green economy* di Indonesia rentang tahun 2014 hingga 2022 dalam sektor kehutanan dan transportasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan berguna bagi para pembaca untuk mendapatkan informasi mengenai pembangunan ekonomi yang memperhatikan aspek

keberlanjutan, tata kelola baik dan keramahan lingkungan. Pembahasan yang dipaparkan dalam penelitian ini akan memberikan pandangan terkait berbagai langkah kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mendorong pengembangan ekonomi berkelanjutan dan berorientasi keramahan lingkungan.

1.7 Kajian Literatur

Dalam tulisan artikel jurnal karya Varaidzo Denhere yang berjudul *Sustainability: The Adoption of Green Economy and Sustainable Accounting Principles by South African Listed Companies and Lessons Learnt* dipaparkan mengenai penelitiannya tahun 2022 tentang adopsi pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau (*green economy*) pada beberapa sektor usaha di Afrika Selatan dalam rentang waktu 2015 hingga 2017.¹³ Pada poin pertama Denhere menyebutkan terdapat lima prinsip untuk memenuhi kondisi ekonomi hijau yang sesuai dengan kaidah ukuran pembangunan berkelanjutan, yaitu *The Wellbeing Principle; The Justice Principle; The Planetary Boundaries Principle; The Efficiency and Sufficiency Principle; dan The Good Governance Principle*. Selanjutnya dalam poin kedua Denhere mulai melakukan penelitian aplikasi ekonomi hijau dalam sektor usaha bidang keuangan atau perbankan. Lalu pada poin ketiga Denhere juga melakukan penelitian aplikasi ekonomi hijau di sektor pertambangan dan energi sebagai perbandingan. Dalam melakukan penelitiannya, Denhere menggunakan konsep *green economy* yang menjelaskan jika kondisi

¹³ Varaidzo Denhere, "Sustainability: The Adoption of Green Economy and Sustainable Accounting Principles by South African Listed Companies and Lessons Learnt," *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478) 11, no. 5 (June 29, 2022): hal. 366-376, <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i5.1810>.

lingkungan perlu diciptakan melalui pembentukan masyarakat yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Hal tersebut perlu dicapai melalui pembentukan budaya dan regulasi terhadap aktor-aktor lainnya seperti pelaku usaha untuk ikut mempromosikan gerakan *green economy*. Namun, berdasarkan penelitiannya, Denhere mempelajari jika terdapat tantangan besar di Afrika, yakni perusahaan seringkali tidak memberikan laporan performa yang sesuai terkait kegiatan ramah lingkungan yang telah dilaksanakan. Sehingga pada akhirnya menurut Denhere, inkonsistensi dan rendahnya fasilitas pendukung dalam menjamin aktivitas perusahaan yang berkelanjutan masih menjadi masalah di Afrika Selatan untuk membangun perkembangan ekonomi hijau.

Pada jurnal yang kedua berjudul *Green Deal, Green Growth and Green Economy as a Means of Support for Attaining the Sustainable Development Goals* oleh Mieczysław Adamowicz tahun 2022, diberikan penjelasan mengenai perkembangan penelitian konsep *green economy* sebagai salah satu isu internasional yang sudah berkembang sejak awal abad ke-20.¹⁴ Pada pemaparan poin pertama, dijelaskan mengenai faktor yang memicu munculnya aktivitas ekonomi yang menyebabkan degradasi lingkungan. Meningkatnya populasi manusia menyebabkan terjadinya eksploitasi berlebihan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Poin kedua menjelaskan terkait dampak dari industrialisasi dan globalisasi perekonomian tradisional yang menyebabkan produksi gas emisi karbon bertambah, perubahan iklim, kerusakan lingkungan, sehingga menimbulkan

¹⁴ Mieczysław Adamowicz, "Green Deal, Green Growth and Green Economy as a Means of Support for Attaining the Sustainable Development Goals," *Sustainability* 14, no. 10 (May 12, 2022): hal. 1-32, <https://doi.org/10.3390/su14105901>.

kelangkaan energi dan ketidakadilan sosial. Pada poin ketiga mulai masuk ke inti dari perkembangan konsep *green economy* dan *green growth* sebagai paradigma yang muncul dan dibawa oleh ekonom Inggris untuk memperkenalkan sistem perekonomian baru yang berorientasi pada ekonomi yang stabil dan efisien terhadap konsumsi energi dan pemanfaatan sumber daya alam demi mengurangi dampak lingkungan dan sosial. Selanjutnya dalam poin terakhir Adamowicz memaparkan jika paradigma *green economy* seiring perkembangannya mulai diterima sebagai agenda internasional yang mulai diadopsi dan dipromosikan oleh lembaga – lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa – Bangsa untuk dipraktikkan oleh beberapa negara. Adamowicz sendiri melakukan penelitian ini sebagai hipotesisnya jika paradigma *green economy* dan *green growth* merupakan bagian turunan dari konsep pembangunan berkelanjutan sebagai konsep yang digunakannya dalam penelitian ini. Argumen tersebut juga didukung dengan beberapa temuannya yang memaparkan mengenai ukuran dan prinsip-prinsip yang perlu diterapkan dalam menilai implementasi *green economy* di level sebuah negara. Adamowicz juga mengambil contoh kasus pembuatan regulasi di Eropa mengenai pembangunan berkelanjutan yang pada ukurannya sejalan dengan apa yang menjadi ukuran nilai terciptanya *green economy*. Menurut Adamowicz, kemunculan masalah yang ditimbulkan dari globalisasi dunia mempopulerkan istilah *green economy* sebagai paradigma yang harus mulai diimplementasikan sejak dini oleh aktor-aktor internasional. Hal ini sebagai upaya untuk mencapai target dan merubah transisi perekonomian yang awalnya memiliki banyak dampak

sosial serta lingkungan menjadi sebaliknya yakni berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan minimnya degradasi lingkungan.

Selanjutnya dalam artikel jurnal yang ketiga berjudul *Exploring green economy strategies and policies in developing countries* tahun 2016 yang ditulis oleh Godswill Megwai, Isatou Njie, dan Tobias Richards diberikan penjelasan mengenai implementasi strategis kebijakan *green economy* yang diterapkan di lima negara berkembang.¹⁵ Menurut Megwai, Njie, dan Tobias kebijakan negara dan implementasi program di negara tersebut berbeda - beda. Pada poin pertama, negara kawasan Afrika cenderung mengaplikasikan kebijakan nasional yang berfokus pada pemberdayaan kualitas manusia, agrikultur, dan lapangan kerja hijau untuk memenuhi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Poin kedua yakni negara Eropa seperti Kroasia lebih terfokus terhadap pengembangan dan pengelolaan energi terbarukan yang ramah lingkungan di sektor transportasi, industri, pariwisata, dan pengelolaan konsumsi energi. Thailand berfokus kepada program skala nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara secara inklusif dan merata menuju *middle income country* dengan cara memperbaharui dan membangun fasilitas berupa konstruksi hijau serta teknologi hijau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara stabil di setiap sektor pembangunan. Megwai dan rekan penulisnya menggunakan konsep *green economy* dengan pendekatan sebuah kebijakan nasional yang mengadopsi sistem perekonomian hijau. Mereka menemukan sebuah hasil penelitian yang menyatakan jika setiap

¹⁵ Godswill Megwai, Ndey Njie, and Tobias Richards, "Exploring Green Economy Strategies and Policies in Developing Countries," *International Journal of Green Economics* 10, no. 3/4 (2016): hal. 338-357, <https://doi.org/10.1504/ijge.2016.081905>.

lima negara berkembang dalam penelitiannya mendapatkan hasil positif bagi negaranya masing-masing di setiap sektor nasional yang dikembangkan. Berdasarkan penelitiannya, Megwai menyebutkan pada intinya setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda sehingga implementasi program dan juga sasaran pembangunan hijau yang dikembangkan akan berbeda juga. Tingkat pertumbuhan *green economy* di beberapa negara tersebut dipengaruhi oleh kapasitas dan performa pemerintahan tiap negara, keadaan sosio-ekonomi negara, dan keadaan geografis negara masing - masing.

Dalam pemaparan ketiga jurnal yang telah dibahas, para peneliti tersebut memiliki fokus penelitiannya masing - masing di ranah yang berbeda serta keberagaman hasil penelitian yang berbeda juga. Jurnal pertama, Denhere menjelaskan adopsi program *green economy* melalui *private sector* sebagai pemeran utama peningkatan kualitas lingkungan. Menurutnya inkonsistensi implementasi program yang dilakukan perusahaan - perusahaan bank dan tambang menjadi kesulitan utama untuk keberlanjutan. Lalu pada jurnal kedua, dalam penelitian Adamowicz misi *green economy* perlu mendapatkan perhatian besar di forum internasional. Adamowicz menekankan jika pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan perlu ditanggapi secara kolektif melalui kerjasama dan rekognisi skala regional. Selanjutnya dalam jurnal ketiga yang ditulis oleh Megwai, Njie, dan Tobias memaparkan kebijakan nasional yang mengadopsi visi *green economy* di beberapa negara berkembang. Menurut Megwai dan rekannya kapasitas dan atribut nasional menentukan adopsi serta kepentingannya tersendiri dalam upaya pertumbuhan *green economy*. Ketiga kajian

literatur di atas memiliki keterkaitan dalam isu bahasan serta kesulitannya. Namun pokok bahasan mereka akan berbeda dengan penelitian penulis yang menekankan kepada peran pemerintah sebagai aktor utama, dan juga studi kasus pengembangan ekonomi hijau yang dilakukan di Indonesia.

1.8 Kerangka Pemikiran

Green Economy

Kerangka pemikiran utama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori ekonomi hijau. Kemunculan konsep atau teori ekonomi hijau atau *green economy* diawali dari pertumbuhan pesat revolusi industri dunia pasca perang dunia kedua usai. Pertama, negara - negara yang melakukan revolusi industri besar - besaran di tahun 1960 - 1980 secara tidak langsung menimbulkan dampak cukup besar terhadap masalah lingkungan. Aktivitas industri serta perekonomian dunia yang berbasis terhadap kepentingan negara, menjadi situasi kompetitif bagi tiap negara untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Dunia perekonomian telah menciptakan kondisi dimana orang - orang secara tidak sadar lebih konsumtif dan eksploitatif terhadap sumber daya alam hingga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem lingkungan.¹⁶ Atas dasar tersebut perhatian akan keramahan lingkungan mulai muncul dikalangan aktivis dan juga dunia internasional agar mempertimbangkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

¹⁶ Molly Scott Cato, *Green Economics: An Introduction to Theory, Policy and Practice* (Routledge, 2012). hal. 7.

Pada buku yang ditulis oleh Molly Scott Cato berjudul *Green Economics An Introduction to Theory, Policy and Practice* tahun 2009, memuat pemaparan tentang pemahaman teori ekonomi hijau. Dalam teori ekonomi hijau atau *green economy* dijelaskan jika kemunculan teori ini disebabkan oleh kondisi perubahan iklim yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi yang berdampak buruk pada lingkungan. Dalam argumentasinya, para pemikir *green economy* memberikan pandangan pemikiran yang berbeda dengan para ekonom pada umumnya. Molly menjelaskan jika ada beberapa poin penting untuk mencapai perwujudan ekonomi hijau. Pertama Molly berargumen bahwa kondisi pasar atau sistem ekonomi secara global yang berorientasi terhadap keuntungan pasar, tidak layak secara terus menerus dipraktikkan. Melainkan ada hal yang lebih penting yakni kestabilan ekonomi bagi suatu negara untuk jangka panjang. Poin yang kedua, konsep *green economy* lebih memikirkan dimensi ekonomi secara luas, tidak hanya membahas perdagangan barang dan jasa, akan tetapi juga mendorong agar semua orang atau negara mulai mempertimbangkan kontribusinya atau manfaatnya terhadap bumi (pengurangan emisi gas karbon) dan ekosistem manusia didalamnya. Poin yang ketiga menyebutkan jika, kehidupan ekonomi yang layak bagi manusia perlu dicapai melalui proses kegiatan ekonomi yang berbasis keadilan dan punya dampak positif secara sosial bagi masyarakat maupun lingkungannya. Berikutnya teori ekonomi hijau juga mendorong agar aktor yang terlibat seperti negara dan masyarakat perlu saling berkolaborasi dalam mewujudkannya. Selain itu, perekonomian hijau juga mendorong agar baik pemerintah negara, masyarakat dan juga sektor usaha itu mengimplementasikan kegiatan ekonomi secara transparan,

penuh akuntabilitas, serta dapat bekerja secara efisien untuk meningkatkan kualitas hidup semua orang dan juga kelayakan kondisi lingkungan bagi masyarakat.¹⁷

Tujuan dalam membangun pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan untuk jangka panjang ialah agar suatu negara bisa mendapatkan manfaat lebih banyak. Selain untuk mendapatkan keuntungan, pembangunan jangka panjang akan menjadi penopang untuk kestabilan ekonomi secara kolektif baik bagi negara dan juga masyarakatnya. Lalu pembangunan ekonomi yang berbasis lingkungan akan memberikan dampak positif bagi generasi makhluk hidup kedepannya untuk mencegah masalah perubahan iklim dan masalah lingkungan lainnya. Berikutnya perwujudan ekonomi yang adil secara sosial juga akan mengurangi kesenjangan antara komunitas masyarakat satu sama lainnya. Dalam artian akan mengurangi kerugian yang nantinya bisa menimpa salah satu kelompok masyarakat saja. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerjasama seperti misalnya dalam membangun regulasi, program, dan juga sistem perekonomian yang memberikan manfaat terhadap pembangunan yang efisien dan berkelanjutan. Kondisi perekonomian hijau bisa tercapai jika budaya kegiatan ekonomi sudah mulai terfokus dalam pembangunan pasar secara berkelanjutan dengan upaya mengurangi produksi dan penggunaan zat-zat berbahaya terhadap ekosistem lingkungan seperti produksi emisi karbon yang berkurang. Selain itu, pemerintah dan juga para pengusaha perlu mengimplementasikan cara kerja dan berbisnis dengan terbuka, terpercaya, dan

¹⁷ *Ibid. hal. 10-14.*

memiliki akuntabilitas agar meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan baik.¹⁸

Pada tahun 1989 inisiasi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menjadi sebuah isu besar yang diangkat di forum Perserikatan Bangsa - bangsa. Sebagai salah satu isu global, dalam upaya mengurangi penggunaan gas emisi karbon, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan tentunya tidak bisa dilakukan tanpa aksi kolektif.¹⁹ Maka dari itu konsep *green economy* juga mendorong aktor dunia internasional seperti negara dan organisasi internasional untuk membuat suatu kebijakan dalam rangka membangun ekonomi yang berwawasan lingkungan. Sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, suatu negara diharapkan bisa menciptakan budaya baru dimana kegiatan ekonomi mereka akan bertumbuh melalui kebijakan nasional, pembangunan infrastruktur, dan pemanfaatan sumber daya negara demi kelestarian alam. Setiap negara juga memainkan peran penting dalam memberikan pemberdayaan bagi sektor bisnis dan komunitas masyarakat untuk mengimplementasikan cara hidup yang berkualitas serta peduli terhadap aspek lingkungan.²⁰ Salah satu prinsip *green economy* juga adalah implementasi prinsip *good governance*. Prinsip *good governance* mencerminkan perilaku pemerintah yang mengedepankan sikap demokratis, transparansi, akuntabilitas serta peduli terhadap kepentingan lingkungan, sosial, dan pembangunan masyarakatnya yang nantinya akan menjadi kerangka pemikiran

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ David W. Pierce, Anil Markandya, and Edward B. Barbier, *Blueprint for a Green Economy* (London: Earthscan, 1989). hal. 4.

²⁰ *Ibid.* hal. 7.

ketiga dalam penelitian ini.²¹ Selain itu *green theory* juga akan menjadi kerangka pemikiran kedua dalam menganalisis permasalahan lingkungan dan peran yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap sektor lingkungan di era Presiden Jokowi.



Keterangan : Bagan dibuat oleh penulis sendiri

Green Theory

Dalam kerangka pemikiran penulis juga menggunakan *green theory* untuk melakukan penelitian ini. Sebelum menjadi sebuah teori yang populer, kemunculan *green theory* didorong oleh adanya gerakan yang memelopori isu atau masalah lingkungan yang terjadi di dunia. Paradigma Hubungan Internasional (HI) ini mulai muncul dan berkembang pada tahun 1960, tepatnya setelah era perang dunia kedua berakhir. Selama masa pasca perang, masyarakat dunia internasional dianggap telah memasuki zaman modernisasi. Perkembangan zaman ini ditandai dengan pesatnya kemajuan perekonomian dunia dan maraknya pembangunan industrialisasi di berbagai negara. Para pemikir *green theory* ini menganggap bahwa perkembangan

²¹ Global Green Growth Institute, "The Five Principles of Green Economy," diakses pada 29 Oktober 2022, <https://www.gggi.org/wp-content/uploads/2019/06/5-principles-of-GE-One-Page-250619.pdf>.

industrialisasi yang terjadi selama masa revolusi industri telah mengancam kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Mereka berasumsi bahwa proses – proses kemajuan ekonomi dan perkembangan industri yang telah dibangun, dilakukan dengan mengeksploitasi sumber daya lingkungan yang ada secara berlebihan, sehingga bisa menimbulkan dampak buruk kedepannya.²²

Menurut para pemikir *green theory*, masyarakat dunia internasional harus mulai memperhatikan masalah lingkungan ini sebagai salah satu masalah besar dalam dunia internasional. Hal ini dikarenakan pada masa – masa tersebut para aktor di dunia internasional masih terlalu fokus akan ancaman isu – isu tradisional keamanan, seperti konflik antarnegara, peperangan, dan ekonomi. Dalam isu keamanan tradisional, suatu negara misalnya, kepentingan yang mereka kejar hanya berorientasi pada kemajuan ekonomi serta membangun sistem keamanan demi mencegah suatu ancaman yang memiliki dampak langsung terhadap manusia seperti peperangan salah satunya.²³

Para pemikir *green theory* ini mengkritik teori – teori tradisional sebelumnya seperti cara pandang neorealis dan neoliberal yang hanya menganggap bahwa manusia merupakan satunya – satunya entitas makhluk hidup yang perlu dipikirkan nilainya dan selalu dimanjakan oleh kemajuan ekonomi. Padahal menurut mereka, masalah lingkungan jika tidak segera diperhatikan, lama – lama akan menjadi ancaman juga bagi entitas manusia dan negara itu sendiri. Seperti halnya ketika lapisan ozon bumi semakin menipis dikarenakan bahan kimia

²² Tim Dunne, Milja Kurki, and Steve Smith, *International Relations Theories: Discipline and Diversity* (UK: Oxford University Press, 2013). hal. 266.

²³ Stephen McGlinchey, Christian Scheinplflug, and Rosie Walters, *International Relations Theory* (Bristol: E-International relations, 2017). hal. 86.

industri, maka akan terjadi pemanasan global yang bisa berakibat pada kebakaran hutan, atau kenaikan permukaan air laut karena mencairnya es di kutub utara. Selain itu, dengan eksploitasi berlebihan, lama kelamaan sumber daya alam akan semakin langka. *Green theory* juga mengkhawatirkan dengan adanya komunitas manusia lainnya yang nanti bisa termarginalkan karena tidak dapat lagi memanfaatkan sumber daya alam.²⁴ Isu lingkungan seperti ini adalah masalah yang ingin diangkat sebagai masalah HI oleh para pemikir *green theory* karena nantinya akan menjadi masalah global yang juga berdampak ke seluruh dunia. Karena teori ini mulai berkembang di dunia HI, teori ini semakin dalam memasuki ranah politik dan memunculkan aktor – aktor baru yang mempeloporinya seperti kemunculan partai politik, *NGOs*, dan mendorong adanya kerjasama internasional.²⁵ Aplikasi *green theory* pada penelitian ini akan digunakan dalam menganalisis Indonesia sebagai aktor negara dan posisi mereka di level internasional terkait inisiasi pengurangan gas emisi serta pembangunan berwawasan lingkungan di Indonesia.

Good Governance

Berikutnya, sebagai salah satu prinsip dari penerapan *green economy*, konsep *good governance* juga akan menjadi kerangka pemikiran ketiga dalam penelitian ini. Dalam buku yang berjudul *Good governance and civil society : Selected issues on the relations between State, economy and Society* dijelaskan bahwa argumen utama konsep ini adalah kehadiran pemerintahan yang baik akan

²⁴ *Ibid.* hal. 87

²⁵ Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, *International Relations Theory*, 5th ed. (Pearson Education Limited, 2013). hal. 152.

memberikan kondisi pengelolaan komunitas yang baik. Pemerintah memiliki peranan utama dalam kenegaraan untuk mengatasi masalah - masalah yang berkaitan dengan sosial dan ekonomi negara. Sebuah pemerintahan yang baik mencerminkan pengelolaan tata kelola institusi yang mengedepankan kredibilitas, efisiensi, dan akuntabilitas yang baik.²⁶ Dalam level negara, konsep *good governance* bagi peranan pemerintah adalah ketika mereka bisa memberikan pelayanan publik dengan baik melalui kebijakan - kebijakannya yang diberikan kepada masyarakat. *Good governance* juga mencerminkan penataan komunitas masyarakat yang baik melalui pemberdayaan dan keberlanjutan lingkungan serta ekonomi.²⁷

Menurut *United Nations*, karakteristik *good governance* meliputi beberapa aspek. Pertama adalah partisipasi, pemerintah yang baik dinilai menerapkan proses demokrasi dengan mengedepankan kebebasan berpendapat dan kebebasan bagi setiap orang untuk terlibat dalam suatu kepentingan organisasi; kedua aturan hukum, pemerintah harus mencerminkan penegakkan hukum serta perlindungan hukum secara adil dan tegas kepada setiap orang; ketiga transparansi, pemerintah harus terbuka kepada masyarakat dalam setiap perumusan hukum dan kebijakan yang dibuat demi suatu kepentingan bersama; keempat responsif, pemerintah harus bertindak cepat dalam memberikan layanan kepada masyarakat terutama dalam pengambilan keputusan;²⁸ kelima berorientasi terhadap konsensus, pemerintah

²⁶ Adam Jarosz, *Good Governance and Civil Society : Selected Issues on the Relations between State, Economy and Society* (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014). hal. 7.

²⁷ *Ibid.* hal. 15.

²⁸ United Nations, "What Is Good Governance ?" (United Nations Economic and Social Commission for Asia and The Pacific), diakses pada 29 Oktober 2022, <https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf>. hal. 2.

perlu terlibat aktif sebagai pihak yang merangkul kepentingan masyarakat atau komunitas lainnya agar mendukung pemberdayaan dan pembangunan; keenam kesetaraan dan inklusif, pemerintah perlu menegakkan kesetaraan di komunitas masyarakat tanpa adanya diskriminasi agar setiap pihak merasa dilibatkan dengan baik; ketujuh efektif dan efisien, kinerja pemerintah harus betul - betul mengakomodasi kepentingan masyarakat, seperti misalnya menjaga pengelolaan lingkungan dan sumber daya dengan baik; lalu yang terakhir adalah akuntabilitas, pemerintah ataupun sebuah lembaga harus bisa diandalkan dan dipercaya dalam membuat sebuah keputusan melalui proses pertimbangan yang matang.²⁹ Karakteristik *good governance* ini akan menjadi alat kerangka pemikiran dalam memahami kinerja pemerintahan Jokowi serta kementerian dan lembaga negara yang terkait. Peranan pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia akan cocok dibahas menggunakan konsep *good governance*.

1.9 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut John W. Creswell dalam bukunya yang berjudul *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, metode kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang prosesnya dilakukan dengan cara eksploratif dalam upaya memahami fenomena sosial yang terjadi antara dua variabel penelitian. Karakteristik metode penelitian kualitatif dalam

²⁹ *Ibid. hal. 3.*

penelitian ini akan bersifat analisis deskriptif.³⁰ Selain itu model penelitian kualitatif yang akan digunakan oleh penulis adalah model studi kasus. Model studi kasus dalam penelitian kualitatif artinya penelitian ini akan berfokus terhadap suatu peristiwa kejadian yang telah terjadi di periode, dan tempat tertentu untuk memahami permasalahannya.³¹ Model studi kasus dianggap akan sesuai dengan topik penelitian ini dalam mempelajari kinerja pemerintah Indonesia dalam mendukung pengembangan *green economy* era Presiden Joko Widodo.

Selanjutnya dalam melakukan pengumpulan data, penulis akan memperoleh informasi dari data yang berasal dari pengumpulan dokumen dan observasi.³² Data primer dari dokumen dan juga observasi akan diperoleh melalui kunjungan ke website resmi lembaga pemerintahan terkait seperti Kementerian Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penelitian ini juga akan didukung oleh pengumpulan data sekunder seperti data dari artikel jurnal, dokumen resmi, laporan, dan kumpulan berita. Data yang telah dikumpulkan lalu akan diolah sebagai bahan analisis terhadap pembahasan dari penelitian ini.

1.10 Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan pembagian sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab, yaitu :

³⁰ John W. Creswell, *Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (London: SAGE Publications, 2017). hal. 201.

³¹ John W. Creswell, *Qualitative, Quantitative, and Research Design*, 4th ed. (United States of America: SAGE Publications, 2014). hal. 14.

³² John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3rd ed. (United States of America: SAGE Publications, Inc, 2009). hal. 181.

Bab I akan membahas terkait latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, serta metode penelitian dan teknik pengumpulan data ;

Bab II akan membahas mengenai topik *green economy* sebagai isu ekonomi internasional, visi dan misi pemerintah Indonesia dibawah komando Presiden Joko Widodo, kondisi perekonomian nasional Indonesia di era Presiden Joko Widodo, serta komitmen Negara Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia secara internasional ;

Bab III membahas mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam melakukan pengembangan *green economy*. Pemaparan akan membahas mengenai pemerintah Indonesia yang membuat kebijakan nasional, program sosial yang dilakukan, pembentukan dan kerjasama lembaga - lembaga terkait, pembangunan infrastruktur, kerjasama internasional terkait investasi, pemanfaatan sumber daya negara, dan upaya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di Indonesia ;

Bab IV memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian terkait kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo serta proses dan hasil yang telah dicapai.